

DAMPAK KEBAKARAN LAHAN TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO 32 TAHUN 2009

Taufida^{1*}, Achmad Romsan², Mirza Antoni³

Universitas Sriwijaya, Program Studi Pengelolaan Lingkungan¹.

*Correponding Author : 93120026@polri.go.id

ABSTRAK

Kebakaran hutan di Indonesia merupakan ancaman potensial bagi pembangunan berkelanjutan. Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi paling rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini mengenai dampak kebakaran lahan terhadap kesehatan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir di tinjau dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pemilihan informan menggunakan purposive sampling dengan beberapa kriteria. hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2010 sejumlah 102, tahun 2011 berjumlah 2.429, tahun 2012 berjumlah 2.759, tahun 2013 berjumlah 230 yakni mengalami penurunan, tahun 2014 berjumlah 4.229, dan pada tahun 2015 berjumlah 16.008 titik panas. Jumlah tersebut adalah jumlah terparah yang ada di Indonesia hal ini menimbulkan beberapa penyakit yang muncul akibat adanya kebakaran lahan yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sesak nafas ringan, penurunan daya tahan tubuh berupa meriyang dan demam, iritasi mata ringan hingga berat, hingga penyakit infeksi saluran pernafasan (ISPA). Adapun strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hingga Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah mempererat koordinasi, kerjasama, dan komunikasi antar instansi dalam penanggulangan bencana kebakaran lahan

Kata kunci: kebakaran, lahan, kabupaten ogan komering ilir, Kesehatan masyarakat, karhutla

ABSTRACT

Forest fires in Indonesia are a potential threat to sustainable development. South Sumatra Province is one of the provinces most prone to forest and land fires. This research is about the impact of land fires on public health in Ogan Komering Ilir Regency in review of Law Number 32 of 2009. the research method used is qualitative with the selection of informants using purposive sampling with several criteria. the results showed that in 2010 there were 102, in 2011 there were 2,429, in 2012 there were 2,759, in 2013 there were 230 which decreased, in 2014 there were 4,229, and in 2015 there were 16,008 hotspots. This number is the worst number in Indonesia, causing several diseases that arise due to land fires in Ogan Komering Ilir Regency are mild shortness of breath, decreased endurance in the form of meriyang and fever, mild to severe eye irritation, to respiratory infections (ISPA). The strategy carried out by the South Sumatra Provincial Government and the Ogan Komering Ilir District Government is to strengthen coordination, cooperation and communication between agencies in land fire disaster management.

Kata kunci: fire, land, ogan komering ilir district, public health, forest and land fires

PENDAHULUAN

Potensial bagi pembangunan berkelanjutan. Bencana yang terjadi di musim kemarau ini menyebabkan kerusakan ekosistem dan kerugian aspek ekonomi, sosial dan budaya. Tacconi (2003: 23) menyebutkan tiga masalah utama terkait dengan kebakaran hutan di Indonesia yaitu (1) pencemaran kabut asap, emisi karbon dan dampak terkait lainnya; (2) degradasi hutan, deforestasi dan hilangnya hasil hutan dan berbagai jasa lingkungan serta (3) kerugian di sektor pedesaan akibat kebakaran hutan dan anomali cuaca yang dipicu oleh kebakaran hutan. ADB

(1999) melaporkan bahwa akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 1997/1998 mencapai kerugian sebesar 10 milyar dolar AS.

Balai KSDA Sumatera Selatan melaporkan bahwa Galaag memadamkan kebakaran di kawasan SM pada tahun 2016 sebesar 14 %, pada tahun 2017 sebesar 3,92 % dan pada tahun 2018 sebesar 10,3 % dari seluruh luas pemadaman yang dilakukan pada tahun tersebut. Meskipun persentase kebakaran yang terjadi di Kawasan SM relatif kecil dibandingkan dengan kawasan lainnya, dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran terutama terhadap fungsi ekologis kawasan sangat besar, terlebih jika kebakaran terjadi di kawasan dengan tipe ekosistem lahan gambut. Agus dan Subiksa (2008: 39) menyebutkan bahwa lahan gambut menyimpan dan menambat karbon yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tanah mineral tetapi pada saat terjadi kebakaran akan merubah fungsi lahan gambut dari penambat karbon menjadi sumber emisi gas rumah kaca utama seperti CO₂, CH₄ dan NO₂.

Luas Lahan Terbakar di Sumatera Selatan, kebakaran di lahan rawa gambut Ogan Komering Ilir diklasifikasikan sebagai kebakaran dalam (ground fire). Faisal Fikri (2012: 16) menyebutkan bahwa kebakaran dalam merupakan kebakaran yang sulit dikendalikan karena tidak menampakkan nyala api, asap tebal, sumber api sulit dideteksi dan penyebaran api menyerupai terowongan di bawah permukaan sehingga menyebar sampai ratusan meter dari sumber api. Upaya pencegahan kebakaran menjadi penting untuk dilakukan di lahan gambut mengingat kebakaran dalam sangat sulit dilakukan. Berbeda dengan pemadaman kebakaran, upaya pencegahan kebakaran hutan sulit diukur secara cepat karena pengaruhnya relatif lama untuk mengurangi kebakaran. Namun demikian upaya pencegahan yang berkelanjutan akan mewujudkan tercapainya misi pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Mengingat dari fakta dari dampak kebakaran lahan terhadap kesehatan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sangat berpeluang menimbulkan penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) dan penyakit lainnya. Berdasarkan hal tersebut tentunya memunculkan permasalahan yang menarik untuk dikaji yang berkaitan dengan Dampak Kebakaran Lahan Terhadap Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Oleh karena itu, penelitian masalah tersebut penting untuk dilakukan, dengan melakukan penelitian dan mengamati proses Implementasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 (BAB X) yang selama ini telah dilaksanakan, agar dapat mengetahui apakah proses tersebut sesuai dengan prosedur yang ada dan mempunyai peran terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian: Dampak Kebakaran Lahan Terhadap Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Tipe atau jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

HASIL

Kebakaran hutan akan sangat berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya dari asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), Asma, iritasi pada mata, tenggorokan dan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat

mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Tersebarunya asap dan emisi gas Karbondioksida dan gas gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan, hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan, karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Berikut tabel yang akan mengelompokkan beberapa jenis penyakit yang ditimbulkan pada kebakaran hutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Tabel 1. Penyakit yang Timbul Akibat Adanya Kebakaran Hutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Tahun 2015

No	Jenis penyakit	Jumlah kasus		Selisih	Persentase
		Sebelum kebakaran 2014	Sesudah kebakaran 2015		
1	ISPA	16.774	29.754	12.980	77,38%
2	Demam	23.105	34.354	11.249	48,68%
3	SesakNapas	25.344	34.764	9.420	37,17%
4	Iritasimata	28.667	39.067	10.400	36,28%
5	Rentan Penyakit	45.213	56.230	11.017	24,37%

sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten OKI, Sumsel pada Tahun 2015.

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa perbedaan jumlah kasus penyakit yang timbul akibat adanya kebakaran hutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2014 dan 2015 adalah terjadi rata-rata peningkatan dari 30% hingga 50%. Kasus yang paling meningkat adalah adanya penyakit ISPA yang pada tahun 2014 sebanyak 16.774 kasus meningkat menjadi 29.754 pada tahun 2015. Peningkatan tersebut dikarenakan jumlah hutan yang terbakar juga semakin meluas antara tahun 2014 hingga tahun 2015.

Tabel 2. Strategi Internal

No	Strategi Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Kekuatan				
1	Pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi BPBD dalam penanggulangan kebakaran hutan sangat bagus	0.20	2	0.40
2	Pembuatan pos – pos di berbagai titik rawan terjadinya kebakaran hutan oleh pemda bekerja sama dengan TNI dan Polri	0.20	3	0.60

3	Penerapan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengendalian Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir	0.15	2	0.30
4	Kerjasama antar instansi kabupaten yang baik dan sesuai arahan pimpinan	0.20	2	0.40
Kelemahan				
1	Sarana dan prasarana yang kurang memadai	0.25	3	0.75
2	Ketidaksesuaian peruntukan anggaran dalam hal penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	0.20	2	0.40
3	Jumlah Sumber Daya Manusia yang ahli dalam mengatasi kebakaran hutan sangat minim	0.25	2	0.50
4	Letak atau kondisi hutan yang terbakar sangat luas	0.25	3	0.75
Total		1.70	19	4.1

Pada tabel diatas menggunakan skala pembobotan dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting) dimana jumlah angka bobot tidak boleh melebihi skor total 1,00 dimana penentuan bobot tersebut dengan ketentuan: 0,25 (sangat kuat) 0,20 (diatas rata-rata dan 0,15 (rata-rata). Faktor pembobotan pada tabel kolom kelima ialah hasil perkalian dari bobot pada kolom ketiga dengan rating pada kolom kelima yaitu dengan hasil perkalian bobot dikali rating dan kemudian dijumlahkan untuk menentukan total tabel IFAS dari hasil penjumlahan total kolom tabel kelima mendapatkan hasil yaitu 4,1.

Tabel 3. Strategi eksternal

No	Strategi Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Peluang				
1	Perhatian pemerintah pusat dan dunia terhadap kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir	0.17	2	0.34
2	Adanya bantuan dari Kabupaten Lain dalam hal pemadaman api	0.17	3	0.51
3	Peran serta pihak swasta yaitu Perusahaan dalam	0.22	3	0.66

penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				
Ancaman				
1	Tradisi penduduk setempat yang masih membuka lahan dengan cara membakar	0.24	3	0.72
2	Ketidapedulian masyarakat tentang bahayanya membuka lahan dengan Membakar	0.20	2	0.40
3	Kondisi alam yang tidak menentu dan panjangnya musim kemarau yang sudah tidak dapat diprediksi	0.20	2	0.40
4	Lemahnya penegakan hukum mengenai oknum yang membuka lahan dengan cara membakar	0.20	3	0.60
Total		1.60	18	3,63

Pada tabel diatas menggunakan skala pembobotan dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting) dimana jumlah angka bobot tidak boleh melebihi skor total 1,00 dimana penentuan bobot tersebut dengan ketentuan: 0,24 (sangat kuat) 0,22(diatas rata-rata) 0,20 (rata-rata) dan 0,17 (dibawah rata-rata). Faktor pembobotan pada tabel kolom kelima ialah hasil perkalian dari bobot pada kolom ketiga dengan rating pada kolom kelima yaitu dengan hasil perkalian bobot dikali rating dan kemudian dijumlahkan untuk menentukan total tabel EFAS dari hasil penjumlahan total kolom tabel kelima mendapatkan hasil yaitu 3,63.

Setelah melakukan perhitungan bobot dari faktor internal dan eksternal untuk menganalisis strategi BPBD dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir akan dilakukan dengan cara menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman dan meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman. Analisis strategi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan oleh BPBD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Matriks SWOT Perumusan Strategi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Internal	<u>Kekuatan</u>	<u>Kelemahan</u>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan tupoksi BPBD 2. Pembuatan pos di titik rawan api 3. Penerapan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengendalian Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir 4. Penerapan kerjasama antar instansi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan parasarana yang kurang memadai 2. Ketidaksihinggaan peruntukan anggaran 3. Jumlah SDM yang ahli sangat terbatas 4. Luas hutan yang terbakar kadang susah dijangkau
Eksternal	<u>Strategi SO</u>	<u>Strategi WO</u>
<p><u>Peluang (Opportunities/O)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perhatian pemerintah pusat hingga dunia mengenai kebakaran hutan 2. Adanya bantuan dari Kabupaten Lain 3. Peran serta pihak swasta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dengan instansi lain dan provinsi lain dalam penanganan kebakaran lahan 2. Meningkatkan sosialisasi kepada warga masyarakat mengenai ancaman hukuman jika melanggar peraturan terhadap kebakaran hutan 3. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat 4. Membuka peluang bagi masuknya stakeholder dalam rangka meminimalisir dampak dari adanya kebakaran lahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bantuan anggaran dari Kabupaten lain terhadap BPBD Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam penanggulangan karhutla 2. Peningkatan kerja sama dengan pihak swasta dalam pemenuhan saran dan prasarana

<u>(Threahts/T)</u>	<u>Strategi ST</u>	<u>Strategi WT</u>
1. Tradisi penduduk setempat yang masih membuka lahan dengan cara membakar	1. Peningkatan kuantitas jumlah pos diwilayah rawan kebakaran	1. Meningkatkan jumlah pembuatan rambu-rambu himbauan bahaya melakukan pembukaan lahan dengan membakar diseluruh wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Ketidakpedulian masyarakat tentang bahaya membuka lahan dengan membakar	2. Meningkatkan program sosialisasi secara berkala kepada masyarakat tentang penerapan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengendalian Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir	
3. Kondisi alam dan iklim yang tidak menentu		
4. Lemahnya penegakan hukum bagi oknum yang sering membuka lahan dengan cara membakar	3. Memperkuat penegakan hukum terhadap oknum yang membuka lahan dengan cara membakar	

Berdasarkan matriks SWOT diatas dengan mempertimbangkan kepentingan-faktor internal dan eksternal serta keterkaitan antar faktor-faktornya maka diperoleh alternatif strategi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir ialah sebagai berikut: (1) Pengoptimalan kualitas pos penanggulangan kebakaran hutan dan lahan didaerah titik rawan api oleh BPBD. (2) Pemberian bantuan anggaran dari Kabupaten lain terhadap BPBD Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam penanggulangan karhutla. (3) Peningkatan kerja sama dengan pihak swasta dalam pemenuhan sarana dan prasarana. (4) Peningkatan kuantitas jumlah pos diwilayah rawan kebakaran. (5) Meningkatkan program sosialisasi secara berkala kepada masyarakat tentang Penerapan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengendalian Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. (6) Meningkatkan jumlah pembuatan rambu-rambu himbauan bahaya melakukan pembukaan lahan dengan membakar diseluruh wilayah desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

PEMBAHASAN

Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami udara yang buruk akibat timbulnya Asap. Sesuai hasil kajian yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Ogan Komering Ilir, kualitas Udara telah mencapai level “Tidak Sehat” dengan nilai 101-199. Kondisi ini lebih buruk jika dibandingkan pada tahun 2014, yang berada pada level “Sedang” dengan nilai partikulat budara berada pada kisaran 70-90. Jarak pandang di Kabupaten Ogan Komering ilir sangat pendek diperkirakan hanya mencapai 200 meter. Hal ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa akibat Asap telah menimbulkan dampak terhadap gangguan Kesehatan Penduduk, gangguan jarak pandang, dan kerusakan lingkungan. Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menyangkut faktor alam, tetapi juga adalah

faktor manusia. Penyebab yang berasal dari alam seperti faktor musim dan lahan gambut yang mudah terbakar, serta kandungan mineral alami yang tidak dapat dihindari. Penyebab yang berasal dari faktor manusia disebabkan kurangnya pemahaman atau arti penting hutan dan dampak dari pembukaan lahan dengan cara membakar.

Strategi pemerintah kabupaten ogan ilir dalam mencegah kebakaran lahan dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Keterlibatan multi instansi berada dalam satu wadah yakni Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran lahan yang dibentuk pimpinan daerah. Di tingkat provinsi satuan tugas (Satgas) dibentuk berdasarkan keputusan gubernur, sedangkan Satgas kabupaten dibentuk berdasarkan keputusan bupati. Satuan tugas ini bukan sebuah lembaga yang tetap namun hanya bersifat ad hoc yang berbatas waktu biasanya satu tahun dalam melaksanakan tugasnya. Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran lahan ini umumnya mulai bekerja tatkala ditetapkan status siaga Kebakaran lahan dan berakhir ketika status darurat Kebakaran lahan dicabut. Satuan tugas ini umumnya bermarkas atau berada di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran lahan di Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas lima sub satuan tugas operasi yang bertugas dalam operasi darat, operasi udara, operasi penegakan hukum (Gakum), sosialisasi dan kesehatan masyarakat. Tindakan pencegahan Kebakaran lahan dilakukan oleh sub Satgas sosialisasi yang menyebarkan informasi tentang larangan membakar dalam maklumat kepolisian. Tindakan penanggulangan Kebakaran lahan dilakukan oleh sub Satgas operasi darat dan sub Satgas operasi udara. Tindakan pasca kebakaran dilakukan oleh sub satuan tugas operasi penegakan hukum (Gakum) dan sub Satgas kesehatan masyarakat. Satuan Tugas (Satgas) Siaga Darurat Bencana Asap Kebakaran lahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 Di Provinsi Sumatera Selatan, tahun 2015, Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran lahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan Nomor 654/KPTS/BPBD/2015 terdiri dari beberapa instansi pemerintahan yakni: BPBD Provinsi, UPTD Pengendalian Kebakaran lahan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh), Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Kepolisian Daerah (Polda), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati). Komandan Satgas adalah Komandan Resort Militer (Danrem) 044/Gapo. Satuan tugas ini terbagi ke dalam sub-sub Satgas yakni operasi darat, operasi udara, operasi penegakan hukum, sosialisasi, dan kesehatan masyarakat.

Analisa Swot Kebakaran Lahan Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pada tahun 2015, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di OKI sekitar 377.365 hektar dengan banyak titik hotspots. Keadaan ini terjadi karena selama tahun 2015 terjadi Curah hujan yang berlangsung sepanjang tahun 2015 pada bulan juli hanya 43,30mm bulan Agustus hanya 95,30mm dan bulan September hanya 77,90mm, dalam kategori tersebut tergolong sangat rendah dan menyebabkan kemarau yang cukup panjang. (Sumber: Badan Klimatologi Stasiun Kenten Palembang (2015-2020). Matrik ini menghitung faktor-faktor strategi dari dimensi internal dan eksternal yakni dari dimensi kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman. Adapun matriksnya dapat dilihat dibawah ini.

Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir secara umum belum tertanggulangi secara menyeluruh, dikarenakan masih banyaknya sarana dan prasarana yang belum memadai yang dimiliki, masih adanya ketidaksesuaian peruntukan anggaran yang dimana sarana yang penting dipergunakan untuk pemadaman api akibat

kebakaran hutan tidak sesuai dengan anggaran yang didapatkan dari pusat dan juga masih banyaknya masyarakat yang membuka lahan dengan membakar karena masih berpikir pembukaan lahan dengan membakar sangat efisien dan efektif inilah yang menjadikan masih banyak terjadinya kebakaran hutan dan lahan di daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup pada dasarnya belum dapat berjalan dengan baik. Hal itu dapat dibuktikan dengan masih terjadinya kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Selatan terutama Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengakibatkan terjadinya kabut asap. Upaya preventif dengan melalui program-program yang ada dirancang BPBD Kabupaten bersama Pemerintah Pusat dan Daerah juga belum berdampak positif. Implementasi yang buruk ini juga diakibatkan oleh proses komunikasi dalam implementasi Undang-undang yang masih buruk. Proses komunikasi yang ada berdasarkan indikatornya menunjukkan hasil yang belum memuaskan untuk memenuhi dan mencapai tujuan undang-undang.

Proses komunikasi dalam Implementasi dibagi dalam 3 dimensi yaitu transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi pemerintah. Proses transmisi itu sendiri terdiri beberapa indikator yaitu media komunikasi, pola koordinasi, dan tingkat kepatuhan. Kemudian kejelasan informasi memiliki indikator tingkat pemahaman dan tingkat ambiguitas. Serta dimensi konsistensi pemerintah dengan indikator keberlangsungan kebijakan dan pelaksanaan penegakkan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan deskripsi data yang diperoleh oleh penelitian dalam penelitian yang berjudul “Dampak Kebakaran Lahan Terhadap Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009”. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Kondisi kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi bagian terparah di dalam darurat bencana nasional. Yakni pada tahun 2010 sejumlah 102, tahun 2011 berjumlah 2.429, tahun 2012 berjumlah 2.759, tahun 2013 berjumlah 230 yakni mengalami penurunan, tahun 2014 berjumlah 4.229, dan pada tahun 2015 berjumlah 16.008 titik panas. Jumlah tersebut adalah jumlah terparah yang ada di Indonesia.

Adapun beberapa penyakit yang muncul akibat adanya kebakaran lahan yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sesak nafas ringan, penurunan daya tahan tubuh berupa meriang dan demam, iritasi mata ringan hingga berat, hingga penyakit infeksi saluran pernafasan (ISPA). Adapun strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hingga Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah mempererat koordinasi, kerjasama, dan komunikasi antar instansi dalam penanggulangan bencana kebakaran lahan. Selain itu, fokus utama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak hanya penanggulangan kebakaran lahan semata, melainkan sudah kepada tahap pencegahan dan deteksi dini kebakarann lahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peliti menyampaikan terima kasih atas dukungan, inspirasi dan bantuan kepada semua pihak dalam membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini termasuk pada peserta yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, F. dan I. G. M. Subiksa. 2008. Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian Dan Aspek Lingkungan. Balai Penelitian Tanah Dan World Agroforestry Centre (ICRAF). Bogor. Indonesia.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. 2010. Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, 2010. Terampil Mengolah Data Kualitatif. Prenada Media Grup; Jakarta.
- Asian Development Bank. 1999. Reducing Poverty: Major Findings and. Implementation, A Report Based on Consultations in Selected Developing.
- Brown, A. A., & Davis, K. P. (1973). Forest fire-control and use.
- Dian Rakyat Ripley, Randall B and Franklin, Grace A. 1986. Policy Implementation and Bureaucracy. Chicago: The Dorsey Press.
- Endrawati. 2016. Analisis Data Titik Panas (Hotspot) dan Areal Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2016. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Faisal, Fikri. 2012. Dampak asap kebakaran hutan pada pernapasan. Jakarta.
- Giglio, L., Descloitres, J., Justice, C. O., & Kaufman, Y. J. (2003). An enhanced contextual fire detection algorithm for MODIS. *Remote sensing of environment*, 87(2-3), 273-282.
- Hills. Zhang, J., & Xu, L. C. (2016). The Longrun Effects of Treated Water on Education: The Rural Drinking Water Program in China. *Journal of Development Economics*, 122, 1-15.
- Karter, M. J. (2003). *Fire loss in the United States during 2002*. Quincy, MA: National Fire Protection Association.
- Karla, Sari Juwita. 2007. Evaluasi Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Pada Gedung Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Kampus Depok, Tahun 2007. Skripsi. Universitas Airlangga.
- Mariyanti, T., & Mahfudz, A. A. (2016). Dynamic circular causation model in poverty alleviation: Empirical evidence from Indonesia. *Humanomics*, 32(3), 275-299.
- Notohadinegoro, T. (2006). Pembakaran dan Kebakaran Lahan. *Jurnal. Ilmu Tanah Universitas Gajah Mada, Yogyakarta*.
- Pasaribu, S. M., & Friyatno, S. (2008). Memahami penyebab kebakaran hutan dan lahan serta upaya penanggulangannya: kasus di Provinsi Kalimantan Barat. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 8(1), 44013.
- Purwanto, Erwan Agus & Sulisyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Puja, I Gusti Agung Wesaka. 2015. Penyampaian Laporan Harian terkait Perkembangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Asap Lintas Batas. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
- Pusdiklatkar. 2006. Modul Pelatihan Perilaku Api. Jakarta
- Qodriyatun, S. N. 2014. Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Prosiding Info Singkat Kesejahteraan Sosial. Peneliti Madya bidang Kebijakan Lingkungan pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Setjen DPR RI. Vol 6(6): Hal 9-12.
- Ramli, Soehatman. 2010. Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran (Fire Management). Jakarta: Dian Rakyat Ripley, Randall B and Franklin, Grace A. 1986. Policy Implementation and Bureaucracy. Chicago: The Dorsey Press.

- Romsan, Achmad, dkk. (2021). Tanggung Jawab Negara Terhadap Kebakaran Lahan Di Propinsi Sumatera Selatan Dampak Kebakaran Lahan Terhadap Kesehatan Masyarakat. Yogyakarta: Bildung
- R. Subekti dan R.Tjitrosubidjo. 2004. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Saharjo, H.B., G. Cornelio. 2011. Seksesi Alami Paska Kebakaran pada Hutan Sekunder di Desa Fatuquero Kecamatan Railaco Kabupaten Ermera Timur Leste. Jurnal Silviculture Tropika. Vol.2(1): Hal 40-45
- Syaufina, L., D. Satyawan., S. Wahyudi., Y. Setyorini., I. Basuki. 2008. Kebakaran Hutan dan Lahan Di Indonesia. Ed Ke-1. Bayumedia Publishing. ISBN. 978-602-8299-02
- Sugiyono. 2012. Statistika untuk penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tacconi, T. 2003. Kebakaran Hutan Indonesia: Penyebab, Biaya dan Implikasi kebijakan. CIFOR Occasional Paper No 38 (i).
- Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Yin, R. K., (1987), Case Study Research: Design and Methods, Sage Publications, Beverly.